

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Evy Sriwati^{1*}, Budi Setiawati², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

Development is a benchmark for the development of an area. The regional autonomy that has been intensified by the government has made most regions throughout Indonesia have carried out development in all sectors, both informal and formal. Road construction is one of the most important things as the main supporter of economic dynamics and activity both at the center and in the regions. Roads also have strategic benefits, one of which is creating large-scale jobs. This study aims to determine the government's planning in the construction of road infrastructure in Tonrorita Village, Biringbulu District, Gowa Regency. The research method in this study was descriptive qualitative with data collection techniques through interview observations. The results of the study revealed that the tonrorita sub-district government had complied with the RPJM guidelines. This can be seen from the role of the regional government in the case of kelurahans in carrying out road construction according to the medium-term development plan (RPJM). However, based on research results, there are still some indicators that have not gone well, such as a lack of human resources.

Keywords: *government, developmen, road infrastructure*

Abstrak

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah. Jalan juga memiliki manfaat strategis yaitu salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan yang berskala besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tekknik pengumpulan data melalui pbservasi wawancara. Hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah kelurahan tonrorita sudah memenuhi pedoman RPJM. Hal tersebut dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam hal kelurahan dalam melakukan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangkah menengah (RPJM). Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik, seperti kurangnya sumberdaya manusia.

Kata kunci: pemerintah, pembangunan, infrastruktur jalan

* evysriwati@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat Sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal. Salah satunya adalah peningkatan pelayanan transportasi darat berupa pembangunan jalan.

Di Indonesia, penyelenggaraan pembanguan dan pemelihara jalan terbagi atas tiga kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provensi/kota berwenang dalam penyelenggaran jalan provensi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Pembangunan infrastruktur adalah bagian terpenting khalayak umum. Sesuai dengan pasal 78 ayat 1 dan 2 UUD No. 4 tahun 2014 menjelaskan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Infrastruktur pada dasarnya membangun aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mutlak didalam masyarakat. Jalan memiliki peranan yang strategis dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, sehingga harus dipertahankan fungsinya dengan baik melalui sistem pemeliharaan yang baik pula. Semakin baik infrastruktur jalannya maka pertumbuhan ekonomi juga semakin cepat, akan tetapi jika infrastruktur jalamn rusak maka pertumbuhan ekonomi juga lambat.

Kelurahan Tonrorita salah satu Kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa. Untuk status klasifikasi jalan adalah jalan nasional sebab menghubungkan antar Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto. Jika dilihat dari perkembangan infrastruktur jalan semestinya jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita menjadi akses jalan prioritas yang merupakan penghubung antara Kelurahan Tonrorita dengan akses menuju ibu kota Kabupaten dan Provinsi

sehingga menjadi wewenang pemerintah kabupaten untuk

memperbaiki infrastruktur jalanan.

Dengan status jalan penghubung Kabupaten, masyarakat tentunya memerlukan jalan yang baik untuk mengakses antar Kabupaten, baik bersekolah, ke rumah sakit maupun mempermudah akses perekonomian masyarakat disekitarnya.

Namun berdasarkan observasi awal di Kelurahan Tonrorita pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita cukup memprihatikan, jika melalui jalan sekitar Kelurahan Tonrorita, maka terlihat adanya kerusakan disepanjang jalan berlubang, berlumpur, becek, dan bahkan ada beberapa yang mengalami kecelakaan karena kerusakan parah jalan. Masyarakat untuk menunjukkan kekesalan dan kekecewaannya terhadap pemerintah maka masyarakat menanam pohon pisang ditengah jalan sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan calegaleg yang setiap tahun ada pengukuran jalan namun belum terselesaikan sampai saat ini.

Melihat kondisi jalanan tentunya peran pemerintah kelurahan sangat penting dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dimana kepala kelurahan mempunyai tugas pokok

memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Dengan melakukan perencanaan yang di maksud disini yaitu merencanakan pembangunan atau pemeliharaan jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita, lalu perencanaan tersebut di realisasikan dengan mengadakan pembangunan maupun perbaikan jalan, lalu dilakukan pengawasan terhadap pembangunan maupun perbaikan jalan, lalu dilakukan pengawasan terhadap pembangunan atau perbaikan jalan yang ada di Kelurahan Tonrorita.

Peneliti sendiri melakukan penelitian di Kelurahan Tonrorita sebab merupakan daerah kelahiran peneliti. Disamping itu selama ini pembangunan jalan ataupun perbaikan jalan di Kelurahan Tonrorita hanya 1 kali terealisasikan. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu fokusnya penelitian pada 3 aspek yaitu pembangunan harus memberikan penekanan pada kapasitas, pembangunan harus menekankan pada pemerataan dan pembangunan menekankan pada pertembuhan untuk terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Tonrorita.

Secara etimologis kata peranan berdasarkan dari kata peran yang artinya “pemain sandiwara, tukang lawak”. Kata

peran “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (poewadarminta 1985: 735). Dengan demikian kata peranan berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat di pisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berarti dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbukannya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Natipula (2012) istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang dimaksud menyeluruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.

Berdasarkan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah pelaksana penguasaan negara yang merupakan kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum dan mengangkat kesejahteraan rakyat.

Menurut Dahlan (Akib & Teparde, 2017) Peranan berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau pemain atau bertindak. Sedangkan pembangunan menurut Siagian (2000:15) adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (*Nation Building*). Maka dapat diartikan peran pemerintah adalah usaha pertumbuhan pemerintah dalam bertindak untuk membuat perubahan yang terencana demi terwujudnya pembangunan.

Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Siagian dalam bukunya administrasi pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengataran, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi ketertiban umum dan keamanan.

Tjokroamidjojo (1988:19) klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa involvement atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima cara: Peraturan Menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan Desa/Kelurahan disebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya Desa/Kelurahan dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan Desa/Kelurahan.

Menurut Siagian pembangunan merupakan “usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. “Dengan demikian, ide pokok pembangunan menurut Siagian mengandung makna: “(a) bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir; (b) pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus; (c) pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; (d) pembangunan mengarah kepada modernitas; (e) modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.”

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai)

untuk mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan dan pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran dan perluasan wawasan manusia (Rohman, 2017).

Salah satu konsep pembangunan yang sangat populer di Indonesia adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam GBHN 1993, yang mengemukakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Secara etimologis kata peranan berdasarkan dari kata peran yang artinya “pemain sandiwara, tukang lawak”. Kata peran “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (poewadarminta 1985: 735). Dengan demikian kata peranan berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Pengertian Infrastruktur menurut American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005), adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan

oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayananpelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur adalah bagian terpenting khalayak umum. Sesuai dengan pasal 78 ayat 1 dan 2 UUD No. 4 tahun 2014 menjelaskan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan insfrastruktur desa/kelurahan ditentukan oleh kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan desa/kelurahan.

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai

suatu sistem dan dalam sebuah sistem infrastruktur adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Menurut (Kuncoro 2010:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Pembangunan insfratraktur menurut Siagian (2005) merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Menurut Grigg (1988) merupakan sistem fisik yang menyediakan

transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Untuk itu peran pemerintah dalam pembangunan jalan sangat berpengaruh besar terhadap mobilitas dan distribusi barang, jasa, maupun penumpang baik di kota-kota besar maupun pedesaan.

Permasalahan jalan untuk setiap daerah pasti ada, seperti keadaan jalan di Kelurahan Tonrorita. Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Infratsruktur jalan adalah kebutuhan mutlak dalam sistem angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi.

Merupakan jalan arteri atau jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer. Jalan ini menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Tanggung jawab pembinaan jalan nasional berada pada pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian 26 Pekerjaan Umum). Jalan nasional ini melayani kepentingan nasional atas dasar strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerahdaerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten/kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten/kota, dan jalan strategis kabupaten/kota. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah permukaan

tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan rel.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, Pendidikan dan Kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Kantor Kelurahan Tonrorita terletak di Jalan Poros Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Adapun jenis dan tipe penelitian dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah: Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, obsevasi secara langsung dan

dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melalui observasi untuk mengetahui strategi pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Gowa.

Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (Manurung, 2005).

Menurut Sugiyono (2017) triangulasi diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Lebih lanjut Sugiyono, membagi triangulasi ke dalam tiga macam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka hasil penelitian diatas akan di bahas lebih lanjut dalam bentuk uraian.

Perencanaan

Perencanaan Pembangunan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa/kelurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan.

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Kelurahan menyusun perencanaan Pembangunan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan yang dimiliki kelurahan Tonrorita melakukan kordinasi pendampingan diwilayahnya. Pembangunan kelurahan mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah Kelurahan pelaksanaan pembangunan Kelurahan, pembinaan kemasyarakatan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Adapun rencana atau agenda dari kepala lurah Tonrorita sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur jalan

merupakan program prioritas kelurahan tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas jalanan yang ada di Kelurahan Tonrorita sendiri. Perencanaan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengusulkan rencana pembangunan jalan sejauh 10 kilometer pada aplikasi Sistem Informasi Pembangunan (SPID) sedangkan pada Rencana Pembangunan Dalam Jangka menengah dengan merencanakan perbaikan saluran air (drainase). Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi Sarah Simbolon, dkk (2021) bahwa perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apapun tujuannya, apapun kegiatannya, tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan kecil atau besar guna perbaikan infrakstruktur.

Negara merupakan organisasi sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau atau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor atau program daerah didelegasikan kepada kepala desa/kelurahan Tonrorita, maka kepada desa/kelurahan mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program daerah

dibahas dan disepakati dalam musyawarah kelurahan yang diselenggarakan oleh BPD.

Kepala lurah mengkoordinasikan pelaksanaan program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kelurahan atau unsur masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah kelurahan Bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, tenaga kerja, serta tempat tinggal untuk pekerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan kelurahan Tonrorita. Kegiatan pelaksanaan pembangunan sendiri sudah terealisasi meski belum sepenuhnya. Terealisasinya pembangunan jalan 2,1 kilometer di lingkungan Batuborong-Baturaga, pengerjaan drainase tahap 1 lingkungan parasangan, dan tahap 2. Lingkungan batueja-lingkungan Tompo'na. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiestra dalam Janice, (2014) bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana

tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pengawasan

Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan melakukan Upaya pemberdayaan Masyarakat. Dimana dalam Upaya pemberdayaan dilakukan melalui pengawasan serta pemantauan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara partisipasi oleh masyarakat. Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kelurahan.

Hasil pengawasan pembangunan desa/kelurahan menjadi dasar pembahasan musyawarah kelurahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Pengawasan terhadap perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM desa/kelurahan dan RKP desa/kelurahan Tonrorita. Pengawasan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai pengadaan barang atau jasa, pengadaan bahan/materi, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengirim bahan atau material, pembayaran upah dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa/kelurahan. Seperti pemerintah di kelurahan

Tonrorita mengawasi langsung proses pembangunan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengecek tingkat kemajuan, penyelesaian dan memeriksa biaya yang digunakan. Serta sudah adanya yang bertugas dalam mengawasi pembangunan jalan yaitu kepala lingkungan setempat, sehingga pengawasan barang, material dan pembayaran upah terkontrol dan sistematis. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang dalam Dewi Sarah Simbolon, dkk (2021) bahwa: "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan dapat disimpulkan bahwa: Pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintah ikut melibatkan masyarakat baik dari pihak keamanan dan tokoh masyarakat.

Mengenai perencanaan pembangunan menurut aparat kelurahan yang dilakukan pemerintah sudah

memenuhi pedoman RPJM, akan tetapi beberapa hal tidak terpenuhi dikarenakan kurangnya SDM. Namun masyarakat masih kurang paham akan adanya pedoman dalam proses perencanaan pembangunan. Pada indikator pelaksanaan pemerintah kepala lurah memiliki peran penting dalam proses penetapan pelaksanaan. Namun masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksanaan pembangunan karena tidak dilibatkan dalam proses tersebut dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan. Dalam rencana kerja pelaksanaan pemerintah Bersama pelaksana Menyusun kegiatan kerja yang akan dilakukan pada kegiatan pembangunan kelurahan tonrorita. Sedangkan untuk pengadaan tenaga kerja adalah orang yang memang sudah ahli dalam infrastruktur jalan.

Pada indikator pengawasan, pemerintah merasa sudah melakukan pengawasan yang cukup baik. Lain halnya dengan masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah masih kurang memberikan pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan masih kurang baik dikarenakan kesibukan yang dimiliki masyarakat dalam bertani.

REFERENSI

- Akib, K., & Tepare, O. A. (2017). *Peran Pemerintah Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso*. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(1), p. 32.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Haris, A. (2005). Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi. *Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan*, pp. 1-9.
- Janice, A. (2014). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Ilmu Pemerintahan*, 3(3).
- Kessa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kuncoro, M. (2011). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Pramana, G. (2013). *Pembangunan Fisik dan Nonfisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara*. *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1).
- Purwadarminta, W. J. S. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rohman, S. (2017). Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 5(3), pp. 437-447.
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(2), p. 834.
- Sedarmayanti, (2003). *Pemerintahan yang Efektif dan Efisien*. Jakarta PT. Gramedia.
- Simbolon, D. S., dkk. (2021). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), pp. 295–302.
- Soewignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Soekanto S. (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali pers.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi dan Starateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.